

ANALISIS STRATEGI MEMPERTAHANKAN PENGUNGKAPAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMSEL YANG MERAHAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMSEL

¹Arbainah Mawardah, ²Andrian Noviardy

¹Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

²Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

[1arbainahwrhdh27@gmail.com](mailto:arbainahwrhdh27@gmail.com), [2andrian.noviardy@binadarma.ac.id](mailto:andrian.noviardy@binadarma.ac.id)

¹088287627986, ²082181396478

ABSTRACT

Problem: The achievement of the quality of the South Sumatra Province regional government's financial reports which have been audited by the BPK is seen from 2014 to the present, resulting in an unqualified audit opinion. Objective: What are the strategies carried out to assist the disclosures produced in Regional Government Financial Reports that receive WTP opinions in South Sumatra Province carried out at the Water Resources Management Service. Method: Using descriptive qualitative research methods through interviews, observation and documentation using analytical techniques, namely data collection, data reduction, data display and data verification referring to theory, namely SWOT analysis. Results: Findings obtained through interviews conducted, the author in this research identified important strategies used by the Water Resources Management Service in maintaining good quality financial reports, which have been prepared using SWOT analysis, there are three strategies, namely the use of the SIPD application, reconciliation monthly financial reports and training and testing of human resource capabilities. There are several limitations that are weaknesses, namely lack of supervision for employee compliance with regulations, difficulty integrating data from various ongoing projects and programs and lack of monitoring of financial transactions to ensure there are no errors or fraud.

Keywords: WTP opinion, financial reports, SWOT analysis, PSDA Department

ABSTRAK

Pemasalahan : Pencapaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah di audit oleh BPK dilihat dari tahun 2014 sampai saat ini, sehingga menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Tujuan : Bagaimana strategi yang dilakukan untuk membantu pengungkapan yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Metode : Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan Verifikasi Data mengacu pada teori yaitu analisis SWOT. Hasil : Temuan yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan, penulis dalam penelitian ini yaitu Mengidentifikasi strategi penting yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan yang baik, yang telah disusun menggunakan analisis SWOT, ada tiga strategi yaitu penggunaan aplikasi SIPD, rekonsiliasi laporan keuangan bulanan dan adanya pelatihan dan pengujian kemampuan sumber daya manusia. Adapun beberapa keterbatasan yang menjadi kelemahan (Weakness) yaitu kurangnya Pengawasan untuk Kepatuhan Pegawai terhadap Peraturan, Kesulitan Mengintegrasikan Data dari Berbagai Proyek dan Program yang Sedang Berjalan dan Kurangnya Pemantauan Transaksi Keuangan untuk Memastikan Tidak Ada Kesalahan atau Penipuan.

Kata Kunci: Opini WTP, Laporan keuangan, analisis SWOT, Dinas PSDA

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia diwajibkan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang sangat diperlukan bagi pemerintah, sebagaimana ditunjukkan oleh komitmennya terhadap kualitas dan kewajiban pelaporan keuangannya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses mengenai status keuangan yang menjadi kewajiban untuk memberikan rincian tentang alokasi dan pemanfaatan sumber daya. Informasi ini dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan entitas membiayai operasinya dan melaksanakan janji dan tugasnya. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen pemerintah terhadap kualitas dan kewajiban pelaporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disajikan dan diungkapkan yang nantinya akan dinilai oleh BPK. Pengungkapan diberikan sesuai dengan kinerja dan pelayanan dasar publik ditahun berjalan. Dengan demikian pengungkapan tertinggi diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1.1 Perkembangan LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Tahun Anggaran Opini Audit

2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Pada Tabel telah dijelaskan Laporan keuangan yang baik telah diwujudkan oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan yang di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilihat dari tahun 2014 sampai saat ini, sehingga menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian (DPRD Pemprov Sumsel, 2024). Opini yang diberikan BPK kepada Pemerintah daerah tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif dan efisien sesuai visi dan misi dari pemerintah daerah yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas di segala bidang untuk lebih baik terhadap keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah telah berupaya membuat kualitas laporan keuangannya sehingga keuangan daerah bisa membaik. Upaya ini menjadi strategi yang perlu diketahui untuk pemerintah daerah lain yang belum dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian setiap tahunnya. Pemerintah

mengatur keuangan daerah dan pemerintah wajib mengacu pada peraturan pemerintah tersebut pada saat melaporkan informasi keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, untuk menunjukkan bahwa SKPD telah menyelesaikan proses penyusunan laporan keuangan yang ada selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pj Manajer Keuangan Daerah (PPKD), maka setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan seakurat mungkin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah yang terkait. Hal ini menjadikan tantangan kepada organisasi perangkat daerah terkhususnya untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu SKPD yang menyajikan laporan keuangannya dengan baik. Walaupun tingkat profesional Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas PSDA masih rendah tetapi mereka telah melalui tahap pengujian kemampuan dan pelatihan mengenai proses pembuatan laporan keuangan yang mematuhi Standar Akuntansi. Sehingga menjadikan laporan keuangan memiliki pencapaian LKPD yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah disebutkan sebelumnya. Maka topik yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimana strategi yang dilakukan untuk membantu pengungkapan yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan pada salah satu organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP di Provinsi Sumsel pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Objek pada penelitian ini mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. serta Teknik analisis data yang digunakan adalah

pengumpulan data, reduksi data, display data atau penyajian data dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (Conclusion Drawing/ verification). Adapun analisisnya menggunakan teori SWOT oleh (Rangkuti, 2016) yang merumuskan strategi.

Dalam pemilihan informan tentang strategi kualitas laporan keuangan yang akan dilakukan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah kepala bidang keuangan dan sekretaris bidang keuangan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Laporan Keuangan Dinas PSDA

Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran bagaimana peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan beserta peraturan perundangundangan lainnya diterapkan. untuk meningkatkan tata kelola yang baik dengan memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada pemangku kepentingan. sebagai komponen penting dalam laporan keuangan tahun anggaran 2023 provinsi Sumatera Selatan. Setiap Kepala Subbagian Keuangan SKPD mempunyai pertanggungjawaban penuh atas laporan keuangan yang disampaikan organisasi. (LKPD PSDA, 2023)

- Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu contoh penerapan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. untuk meningkatkan tata kelola yang baik dengan memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada pemangku kepentingan. Sebagai satu kesatuan dengan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023. Kasubbag Keuangan di setiap SKPD merupakan orang yang bertanggungjawab penuh terhadap laporan keuangan SKPD yang dibuatnya (LKPD PSDA, 2023). SKPD wajib menyerahkan laporan keuangan sebagai berikut:

- Laporan Realisasi Anggaran

Pengungkapan pada Pendapatan terpenuhi secara keseluruhan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Informasi mengenai laporan realisasi anggaran yang pengungkapannya sudah disajikan dengan lengkap yaitu menyandingkan realisasi pendapatan, belanja,

transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Seluruh item akuntansi tersebut disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Setiap item dibandingkan dengan jumlah yang dialokasikan. Konsumen pelaporan dapat menggunakan informasi ini untuk menilai pilihan mengenai sumber daya keuangan, akuntabilitas entitas pelapor, dan kepatuhan anggaran entitas akuntansi yang dibutuhkan.

Seluruhnya dimuat pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat kebijakan keuangan, alasan terjadinya perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang memberikan informasi tambahan mengenai informasi yang dianggap perlu untuk diperjelas dan memberikan penjelasan tambahan mengenai Laporan Realisasi Anggaran. Anggaran belanja TA 2023 adalah sebesar Rp100.254.930.000,00 terealisasi sebesar Rp81.817.921.810,00 atau 81,61%. Apabila dibandingkan dengan Belanja Tahun 2022 terjadi penurunan Realisasi Belanja pada tahun 2023 dari Rp94.714.414.596,00 menjadi Rp81.817.921.810,00.

- Neraca

Berdasarkan klasifikasi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan membuat neraca yang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sesuai SKPD, pengungkapan rinci diberikan untuk setiap akun di neraca dan dikategorikan berdasarkan kategori aset. Hal ini menunjukkan bahwa semua pengungkapan yang diperlukan mengenai aset lancar, aset tetap, aset lain-lain, kewajiban, dan ekuitas untuk neraca telah dilakukan. Neraca juga merangkum keadaan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada periode tertentu.

- Laporan Perubahan Ekuitas

Informasi disajikan mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan relatif terhadap tahun sebelumnya. Semuanya disajikan dalam Laporan perubahan Ekuitas. Setidaknya Laporan Perubahan Ekuitas menampilkan komponen Ekuitas awal, Surplus/defisit, dan LO pada waktu yang bersangkutan. Penyesuaian yang segera menaikkan atau menurunkan ekuitas, mengakhiri ekuitas. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp667.911.422.065,20 turun sebesar Rp16.366.136.601,45 dari Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp684.277.558.666,65 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp684.277.558.666,65 adalah saldo akhir ekuitas Tahun 2022. Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai

Rp98.006.882.339,40. Dan Jumlah Ekuitas Akhir yaitu sebesar Rp667.911.422.065,20 adalah saldo akhir Ekuitas Tahun 2023.

- **Laporan Operasional**

Laporan operasional dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) biasanya mencakup beberapa bagian penting yang memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Laporan operasional ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan transparansi, memberikan pemangku kepentingan informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja dinas PSDA serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara efektif dan efisien. Laporan Operasional dalam laporan keuangan Dinas PSDA dapat diringkas bahwa sumber daya keuangan yang mendorong kesetaraan dan entitas suatu SKPD yang dikelola oleh negara/ pemerintah yang menggunakannya untuk tugas administratif selama periode pelaporan tertentu. Hal tersebut disajikan dalam Laporan Operasional. Laporan Operasional secara langsung mencakup unsur-unsur berikut: LO-Pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pos-pos luar biasa.

- **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan semuanya memberikan penjelasan naratif atau spesifik dari angka - angka yang dimuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aturan akuntansi entitas pelaporan informasi lain yang harus memang harus dinyatakan dalam SAP dan sudah disediakan, serta pengungkapan yang diperlukan untuk menciptakan penyajian wajar atas laporan keuangan, semuanya sudah disertakan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai landasan pembuatan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, peristiwa penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Mereka juga menjelaskan item-item laporan keuangan dalam perspektif pengungkapan yang tepat. Pendapatan dan pengeluaran dilaporkan secara tunai dalam Laporan Realisasi Anggaran, artinya dicatat segera setelah uang diterima atau dikeluarkan oleh Kas Daerah. Aset, liabilitas, dan dana ekuitas disajikan dalam neraca dengan menggunakan metode akrual, artinya hak atas aset diakui pada saat perolehannya, dan liabilitas diakui pada saat terwujud, terlepas dari kapan Kas Daerah menerima atau mengeluarkan kas atau dana. setara kas. Catatan laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat diterima karena catatan tersebut menjelaskan prinsip-prinsip di balik

penyusunan laporan keuangan dan peraturan akuntansi yang diikuti oleh lembaga tersebut. Selain itu, mereka dapat mengklarifikasi bahwa informasi tertentu dalam laporan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan adalah tidak benar. disediakan dalam laporan keuangan dan memberikan informasi yang penting untuk memahami laporan keuangan tetapi tidak disertakan dalam laporan keuangan.

Analisis SWOT

Proses wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai strategi mempertahankan opini WTP di Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas PSDA. Informan pertama yaitu kepala sub bagian keuangan sebagai informan utama yang memiliki pengetahuan dan informasi yang menyeluruh, sehingga seluruh pertanyaan dapat diberi tanggapan dengan sangat jelas. dan informan kedua yaitu sekretaris bidang keuangan menjadi informan tambahan. Agar penelitian ini lebih objektif dan data-data lebih akurat, untuk mencari informan lebih banyak, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tujuan mengumpulkan informasi yang tepat dari sumber data yang dapat dipercaya. untuk menyajikan data dari beberapa sudut pandang sehingga selanjutnya dapat dibandingkan dan diambil kesimpulan. Karena kerangka wawancara yang peneliti buat tidak ditentukan sebelumnya, maka apabila informan memberikan jawaban yang kurang jelas, maka peneliti akan menggali lebih dalam untuk mendapatkan klarifikasi sebelum melakukan analisis melalui pertanyaan yang lebih banyak. Untuk menyelidiki lebih lanjut data yang dinilai cukup untuk penelitian, diajukan pertanyaan rinci saat melakukan wawancara.

Pada tahap ini, semua informasi yang telah dikumpulkan dianalisis. data disusun dan dikelompokkan sesuai dengan kategori SWOT. Misalnya, informasi tentang keunggulan kompetitif perusahaan dapat dimasukkan ke dalam kategori kekuatan, sementara risiko dari pesaing baru mungkin dikelompokkan sebagai ancaman. Dengan data yang telah dianalisis, organisasi kemudian dapat menyusun strategi yang memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, sambil mengatasi kelemahan dan ancaman yang diidentifikasi. Strategi ini kemudian digunakan sebagai panduan untuk perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek, memastikan bahwa organisasi siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Melalui metode wawancara, analisis SWOT menjadi lebih kaya dan kontekstual, karena informasi yang

dikumpulkan berasal langsung dari sumber yang memahami dinamika internal dan eksternal organisasi. Berikut Tabel Uraian Analisis SWOT:

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)
	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan aplikasi SIPD RI yang telah teruji. Penerapan aplikasi sistem informasi keuangan daerah juga telah memadai. Adanya analisis kebenaran dan koreksi data dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan rutin setiap bulan diadakan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Adanya pelatihan dan pengujian kemampuan untuk setiap sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengawasan untuk kepatuhan pegawai terhadap peraturan Mengintegrasikan data dari berbagai proyek dan program yang sedang berjalan. Kurangnya pemantauan transaksi keuangan untuk memastikan adanya kesalahan atau penipuan.
Peluang (Opportunity)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi penyebab kesalahan dan mengambil tindakan korektif secara berkala Rapat koordinasi bulanan untuk memonitor kemajuan dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul 	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklajuti setiap kesalahan dengan Pelatihan dan pengujian kemampuan. Mendayagunakan sistem informasi pemerintah daerah. Meminimalisir kesalahan pada saat rekonsiliasi laporan keuangan setiap bulan. Pelatihan dan pengujian kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelatihan kesadaran dalam tugas dan kewajiban pegawai sesuai dengan peraturan pemerintah. Sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi untuk mencatat dan melacak semua transaksi keuangan. Mengelola risiko terkait dengan keamanan data dan integritas laporan keuangan
Ancaman (Threat)	Strategi ST	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan dalam pengumpulan data dikarenakan perubahan dalam kebijakan akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem akuntansi proyek yang terintegrasi dengan aplikasi SIPD Kegiatan rekonsoliasi antar bidang 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komitmen koordinasi

Pembahasan

Strategi Dinas PSDA Untuk Membantu Mempertahankan Opini WTP Provinsi Sumsel Strategi yang dipaparkan ini merupakan strategi yang telah dilakukan oleh dinas PSDA sebagai

upaya untuk membantu Pemprov Sumsel mempertahankan opini WTP. strategi yang telah dilakukan sering kali didasarkan pada pengalaman masa lalu atau kebiasaan yang sudah terbentuk dalam organisasi. Strategi ini mungkin berhasil pada saat itu dan terus digunakan karena dianggap efektif. Namun, strategi ini sering kali bersifat reaktif, hanya menanggapi situasi yang sudah terjadi, dan mungkin tidak selalu memperhitungkan perubahan dalam lingkungan bisnis atau organisasi itu sendiri.

Wawancara yang dilakukan dengan kepala sub bagian keuangan dan sekretaris pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air menyebutkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah menyajikan laporan keuangan dengan sangat baik. Hal tersebut terbukti melalui upaya yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga dapat dikatakan sebagai strategi dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang diraih oleh Provinsi Sumatera Selatan. Strategi ini telah dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan peneliti mencoba mengkaji melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka ada tiga strategi yaitu penggunaan aplikasi SIPD, rekonsiliasi laporan keuangan bulanan dan adanya pelatihan pengujian kemampuan sumber daya manusia. Berikut pemaparan beberapa strategi dalam mempertahankan opini WTP:

1. Penggunaan Aplikasi SIPD
 SIPD Aplikasi FMIS merupakan singkatan dari Financial Management Information System sebuah aplikasi untuk melakukan penatausahaan keuangan daerah yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Aplikasi ini menggantikan SIMDA Keuangan yang sebelumnya pernah digunakan pada tahun 2023. Yang beralih ke SIPD tahun 2024 sesuai amanat kemendagri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengumumkan penghentian layanan Aplikasi FMIS secara resmi melalui Surat 27 Oktober 2023. Hal itu dilakukan melalui Deputi Bidang Pengawasan. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPD RI diluncurkan pada tahun anggaran 2024 Perubahan ini menunjukkan adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan di bidang keuangan pemerintahan. Aplikasi tersebut sudah disempurnakan aplikasi ini otomatis akan mencatat seluruh transaksi belanja daerah. Laporan keuangan akan mulai tercatat ketika ada belanja atau pengeluaran. Penguasaan konsep akuntansi dan

pelaporan keuangan berbasis SIPD diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SIPD RI merupakan mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah. Keputusan yang bijak karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, menawarkan data real-time, dan mengotomatisasi sejumlah prosedur keuangan. Aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk menurunkan risiko penipuan dan penyelewengan dana publik selain menyederhanakan proses pelaporan dan administrasi keuangan. BPPKAD dapat lebih mudah memantau dan mengawasi penggunaan anggaran dalam berbagai program dan proyek pembangunan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dan terpadu. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah akan sangat ditingkatkan dengan penerapan SIPD. Dimungkinkan untuk memaksimalkan keuangan publik dan mengalokasikan anggaran dengan cara yang paling selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. (LIKPD Sumsel, 2024)

2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan

Rekonsiliasi laporan keuangan bulanan adalah proses penting yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan bahwa catatan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) akurat dan konsisten. Proses ini melibatkan perbandingan dan penyesuaian antara catatan keuangan internal Dinas PSDA dengan catatan yang dimiliki oleh BPKAD. Setiap akhir bulan, Dinas PSDA mengirimkan laporan keuangan bulanan yang mencakup seluruh transaksi keuangan selama periode tersebut, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan saldo akhir. BPKAD kemudian memeriksa laporan ini dengan mencocokkan setiap transaksi dengan data yang ada di sistem keuangan mereka. Jika terdapat perbedaan, BPKAD dan Dinas PSDA akan melakukan verifikasi untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, seperti transaksi yang tercatat dua kali, kesalahan penginputan, atau transaksi yang belum tercatat. Laporan keuangan melalui Rekonsiliasi setiap bulan lalu mengeluarkan berita acara yang ditanda tangani oleh kepala sub bagian kepegawaian, kepala sub bagian keuangan, bendahara lalu dirangkum 12 bulan laporan keuangan OPD lalu dirangkum oleh pemprov sumsel seluruh OPD se Sumatera Selatan. Menjadi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan. (LKPD PSDA, 2023) Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang akan dilaporkan ke

pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya adalah benar dan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dari Dinas PSDA. Selain itu, proses ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan melakukan rekonsiliasi secara rutin, Dinas PSDA dan BPKAD dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pelaporan keuangan, serta memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. (PSDA, 2023)

3. Pelatihan dan Uji Kemampuan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengadakan pelatihan dan uji kemampuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dalam pengelolaan keuangan dan aset. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas keuangan secara efektif dan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Selama pelatihan, peserta diberikan materi yang mencakup berbagai topik penting seperti penyusunan anggaran, pencatatan transaksi, rekonsiliasi laporan keuangan, pengelolaan aset, dan audit internal.

Para ahli dan praktisi di bidang keuangan dari BPKAD serta narasumber eksternal turut memberikan materi dan berbagi pengalaman praktik terbaik. Setelah sesi pelatihan, dilakukan uji kemampuan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari. Ujian ini mencakup tes tertulis dan studi kasus praktis yang menantang peserta untuk menyelesaikan masalah keuangan dan memberikan solusi yang tepat. Pelatihan dan uji kemampuan ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai Dinas PSDA dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, Dinas PSDA dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. (PSDA, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengungkapan laporan keuangan dan strategi yang dilakukan untuk terus mempertahankan kualitas laporan keuangannya. Data yang dihasilkan melalui metode wawancara langsung terkait opini BPK untuk seluruh SKPD Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Selatan atas peraihan Opini WTP selama

10 tahun berturut turut. Dan peneliti ingin mengkaji melalui salah satu SKPD yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan secara langsung, terdapat juga temuan dalam mengidentifikasi strategi-strategi penting yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Strategi ini telah disusun menggunakan analisis SWOT. Peneliti mengembangkan strategi yang memanfaatkan kekuatannya untuk mengambil peluang, sambil mengatasi kelemahan dan melindungi diri dari ancaman. Dari hasil wawancara dan analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya untuk mempertahankan opini WTP setiap tahunnya. Maka ada tiga strategi yang telah dilakukan oleh Dinas PSDA yaitu penggunaan aplikasi SIPD, rekonsiliasi laporan keuangan bulanan dan adanya pelatihan dan pengujian kemampuan sumber daya manusia. Hal tersebut yang mendukung kinerja dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.

Saran

Adapun saran yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebaiknya melakukan evaluasi terkait pada konsolidasi kegiatan yang telah dilaporkan pada Laporan Bulanan, pengawasan keuangan dan sumber daya manusia agar dapat memberikan penyajian laporan keuangan yang baik kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan.
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air juga sebaiknya tetap konsistensi atas strategi yang telah dilakukan untuk masa yang akan datang. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ada dan memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan bagi masyarakat.
3. Dapat lebih menerima usulan dan memberikan saran dan arahan strategis terkait program strategis untuk pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan. Terus meningkatkan pelayanan yang cepat dan responsif dari dinas dalam menangani keluhan atau masalah yang berkaitan dengan sumber daya air.
4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas wilayah dan durasi penelitian agar dapat mencapai hasil penelitian yang lebih tepat. Lebih lanjut, untuk mengetahui apakah temuan penelitian ini berlaku untuk kabupaten atau kota di luar Provinsi Sumatera Selatan, disarankan

agar penelitian selanjutnya melakukan penelitian di BPKAD dan menyertakan sampel dari kabupaten atau kota lain di wilayah tersebut

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Allah SWT, yang telah mencurahkan berkat, kasih karunia, anugerah dan pengetahuannya kepada penulis.
2. Prof. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., M.M. selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang.
3. Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma Palembang.
4. Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Darma Palembang
5. Andrian Noviardy, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Karya Akhir yang telah memberikan bimbingan penulisan laporan ini.
6. Seluruh jajaran kepegawaian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sub bagian keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
8. Orang tua, keluarga, teman dan seseorang yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan selama penulisan Karya Akhir.
9. Semua pihak terkait yang ikut terlibat berkenan memberikan bantuan dan kerja sama untuk melancarkan penulisan Karya Akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, Ani Heryani, S. L. (2021). Strategi Pengembangan Sumber daya Manusia Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Ade Iskandar, Ani Heryani, Sariyanto L. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, 7(1).
- Adelima, D. (2024). Pengaruh Aset dan Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 4551–4560.
- Alkalah, C. (2021). ANALISIS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENCAPAIAN OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.
- Andi Kusnadi, Fahmi Oemar, & Bambang Supeno. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, Ayyuby Muhammad. (2021). ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA.
- BPK. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI. <https://sumsel.bpk.go.id/2023/05/10/serahkan-lhp-ke-provinsi-sumsel-anggota-i-sebut-opini-wtp-bukan-hadiah-dari-bpk/>
- Dandi, R. (2023). Penatausahaan Aset Tetap Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Pada Pemerintah Daerah Bengkulu Utara.

- Desi, A. (2019). UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI OPINI WTP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDRAP.DPRD Pemprov Sumsel. (2024). Raih Opini WTP tahun 2024
- Effendy, Y., & Madya, (Widyaiswara. (2019). KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMDA. 11(1), 59–65.
- Eko Susilo Haryadi, K. & V. R. (2021). ANALISIS PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN YANG MERAH OPINI AUDIT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DUA TAHUN BERTURUT-TURUT. Monetary Policy Report,
- Eriza, venaya. (2021). STRATEGI INSPEKTORAT DALAM MEMBANTU MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- Fara Dilla Fasa, R., Masnila, N., & Hartaty, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Se-Sumatera. Jurnal Syntax Admiration.
- Fazri, M. AL. (2023). Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
- Harryanto, H., Sarma, M., & Irwanto, A. K. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jurnal Manajemen embangunan Daerah, 9(1).
- Haryadi, E. S., Kamaliah, & Ratnawati, V. (2022). Analisis Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Kabupaten Yang Meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian Wtp) Dua Tahun Berturut-Turut. Jurnal Akuntansi Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. El Muhasaba Jurnal Akuntansi.
- Jusrizal, Supriyadi, B., & Tahir, B. (2019). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menindaklanjuti Opini Disclaimer Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Seram Bagian BAarat Provinsi Maluku. Visioner, 11(2), 141
- Kamal, B., & Noermansyah, A. L. (2019). Analisis faktor yang mempengaruhi implemetasi simda dan kualitas laporan keuangan pada skpdKEMENDAGRI Republik Indonesia. (2023). PP 71 Tahun 2010.
- Lalu Ade Gusnawan Putra. (2020). STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. 1–9.
- Lepiron Wenda. (2023). STRATEGI PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PADA LAPORAN KEUANGAN DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. 1– 13.
- LKPD PSDA. (2023). Buku Laporan Keuangan PSDA. LKPD Sumsel. (2024). Bimtek SIPD RI. [https://www.pusdiklatpemda.com/bimtek-sipd-ri-keuangan-daerah-tahun-2024/#:~:text=Penelolaan Keuangan Daerah Anggaran 2024,daerah secara online dan terintegrasi.](https://www.pusdiklatpemda.com/bimtek-sipd-ri-keuangan-daerah-tahun-2024/#:~:text=Penelolaan%20Keuangan%20Daerah%20Anggaran%202024,daerah%20secara%20online%20dan%20terintegrasi.)
- Luthfi, M., & Sari, V. F. (2023). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(2), 771–787.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2021). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA, 4(1), 1392–1399.
- Muhammad, F. (2022). UPAYA PEMERINTAH DAERAH MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK RI. Mulyadi, & Soleh, A. (2019). Hubungan Penerapan Pp Nomor 71 Tahun 2010 Dengan Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 2(1), 44–62.
- Nadhilla, C. S. (2022). Strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. 1–10.
- Permadi, H., Siregar, H., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Badan Litbang Dan Inovasi (Kantor Jakarta Dan Bogor). Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 8(2), 1–18.
- PSDA. (2023). Penjelasan Lengkap Tentang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov Sumatera Selatan. <https://dpsda.sumselprov.go.id/>
- Purwaningtyas, R. P. (2022). Upaya Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual. 2010,
- Putra Permana, N., Suhartini, D., & Helmy Dimayantisukiswo, W. (2023). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2018 - 2021. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(4), 131–141.
- Putri, A. G., Widiarto, A., & Al Farizi, M. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam Upaya Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd). Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan,
- Rahmadani, K. I. (2019). Strategi Mempertahankan Opini Wtp Atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Salatiga). Jurnal Universitas Brawijaya, 1(69), 5–24.
- Ramdani, M. (2023). Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan. JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan,
- RENSTRA PSDA. (2024). RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PSDA 2024-2026.
- Safitri, A. F. (2021). Sistem Pengendalian Internal sebagai Strategi dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
- Saleh, I., & Rahadian, Y. (2023). Indonesian Treasury Review Akar Masalah Tidak ercapainya Opini Wtp: Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Xx. 8(2023), 109–124.
- Suranta, S. (2020). Pengungkapan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. 8(1).
- Topan andrian. (2021). ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKATAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- Wicaksono, F. (2023) Analisis Strategi Pemerintah Mempertahankan Opini WTP Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk. International journal of Technology



Jurnal Ekonomika Dan Bisnis

CV. INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING CENTER INDONESIA

Jl. Veteran dalam no. 24d, Padang, Provinsi Sumatera Barat
E-mail : jurnal.ittc@gmail.com - Phone Number: +62882-7087-5130
<https://jurnal.minartits.com/index.php/jeps/>

Letter of Acceptance (LOA) **No:1801/JEBS/LOA/09/2024;**

Dengan ini, Pengelola Jurnal Ekonomika Dan Bisnis - JEBS | E-ISSN : 2807-8438 Terakreditasi **Sinta 5** (Online) memberitahukan bahwa naskah Anda dengan identitas:

Penulis : Arbainah Mawardah, Andrian Noviardy
Judul : Analisis Strategi Mempertahankan Pengungkapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel Yang Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel
Url Publish : <https://jurnal.minartits.com/index.php/jeps//article/view/2107>

Telah memenuhi kriteria publikasi di Jurnal Ekonomika Dan Bisnis dan dapat kami **terima** sebagai bahan naskah untuk Penerbitan Jurnal pada Vol. 4 No. 5 (2024): September - Oktober dalam versi elektronik.

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah/artikel tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit/jurnal lain. Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Padang, 14 September 2024
Hormat Kami



(Mohammad Abdilla)
Chief Editor Jurnal Ekonomika Dan Bisnis

Jurnal Ekonomika Dan Bisnis telah di INDEX oleh :

